



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
2021**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020. LKj IP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP.

Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kota Mungkid, Februari 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Kabupaten Magelang**

DAVID RUDIYANTO, ST., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680511 199803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar belakang.....	1
b. Landasan Hukum	1
c. Maksud dan Tujuan.....	3
d. Aspek Strategis Organisasi.....	3
e. Permasalahan Utama Organisasi.....	10
f. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
a. Capaian Kinerja Organisasi	19
b. Evaluasi Kinerja	23
BAB IV PENUTUP.....	36
a. Tinjauan Umum Keberhasilan.....	36
b. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	37
c. Strategi Pemecahan Masalah.....	37
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dengan Visi RPJPD Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” disingkat “Gemilang”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 - 2024 adalah: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH). Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Titik berat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah menjalankan visi SEDAYA AMANAH dalam visi Bupati Magelang. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan

kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 2, yaitu “ **Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup**”. Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

Guna mencapai tujuan dan urusan tersebut pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan 7 program 41 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 72.435.996.675.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 7 (tujuh) program. Capaian Indikator Sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 adalah cakupan Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercapai sebesar 69,90% dari target akhir Renstra sebesar 92,27%, sehingga capaian indikator sasaran

sampai tahun 2020 sebesar 74,55% dengan status evaluasi kinerja akan tercapai.

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mengampu penerimaan pendapatan daerah dengan target sebesar Rp 1.500.000.000,- realisasi pendapatan daerah yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.541.956.720,- dengan capaian sebesar 102.80%. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Target dan Realisasi Pendapatan Yang diampu DPUPR Tahun 2020

NO	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase %
1	Restribusi Jasa Usaha			
	Pemakaian kekayaan Daerah :	249.275.000	284.776.920	114,24
	a. Sewa tanah dan bangunan	31.274.000	47.068.920	150,50
	b. Sewa alat-alat berat	192.950.000	211.300.000	109,51
	c. Sewa alat – alat laboratorium	25.051.000	26.408.000	105,42
	Lain – lain pendapatan asli Daerah yang Sah :	225.000	37.011.500	16.449,58
	a. Penjualan hasil penebangan pohon	-	19.766.000	-
	b. Penjualan bahan – bahan bekas bangunan	225.000	17.245.500	7.664,67
	Retribusi Perijinan Tertentu :	1.250.500.000	1.220.168.300	97,57
	a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan			
	JUMLAH	1.500.000.000	1.541.956.720	102,80

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat tahun 2020 capaian pendapatan sebesar Rp. 1.541.956.720,- (102,80%) dengan target Rp. 1.500.000.000,- dibandingkan capaian pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 2.391.173.750,- (74,86%) dengan target Rp. 3.194.100.000,-. Untuk capaian target pendapatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 tidak ada penurunan karena disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan lebih kecil dibandingkan tahun 2019.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **208.578.727.115,-**. Dengan realisasi sebesar Rp. **181.125.471.078,-** atau **(86,84%)** terdiri dari **23 program 84 kegiatan** dan silpa anggaran tahun 2019 sebesar **27.453.256.037 atau (13,15%)**.

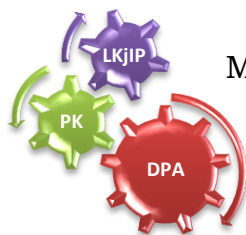
Untuk tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. **72.435.996.675,-** dengan realisasi sebesar Rp. **58.918.293.662** atau **(81,34%)** terdiri dari **7 program 41 kegiatan** dan silpa anggaran tahun 2020 sebesar **13.517.703.013,-** atau **(18,66%)**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2019 yang mencapai **86,84%**, maka realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **5,5%**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2020 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografi
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 September 2020 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2020 Tanggal 21 September 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dengan Visi RPJPD Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah**” disingkat “**SEDAYA AMANAH**”.

Dalam mewujudkan visi RPJMD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 - 2024 adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan**

Amanah (SEDAYA AMANAH). Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Titik berat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah menjalankan visi SEDAYA AMANAH dalam visi Bupati Magelang. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

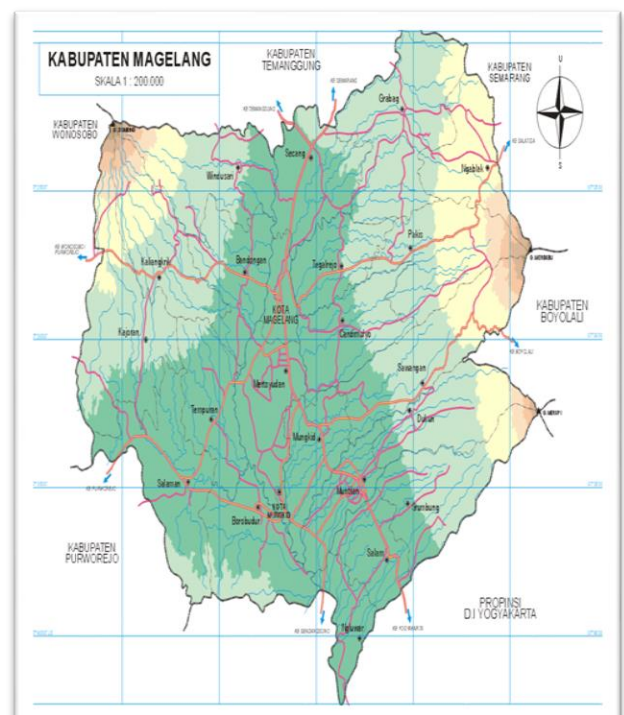
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 2, yaitu **“Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan**

hidup". Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

2. Letak Geografi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 6, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} - 01' - 51''$ Bujur Timur, $110^{\circ} - 26' - 58''$ Bujur Timur, $7^{\circ} - 19' - 13''$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} - 42' - 16''$ Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

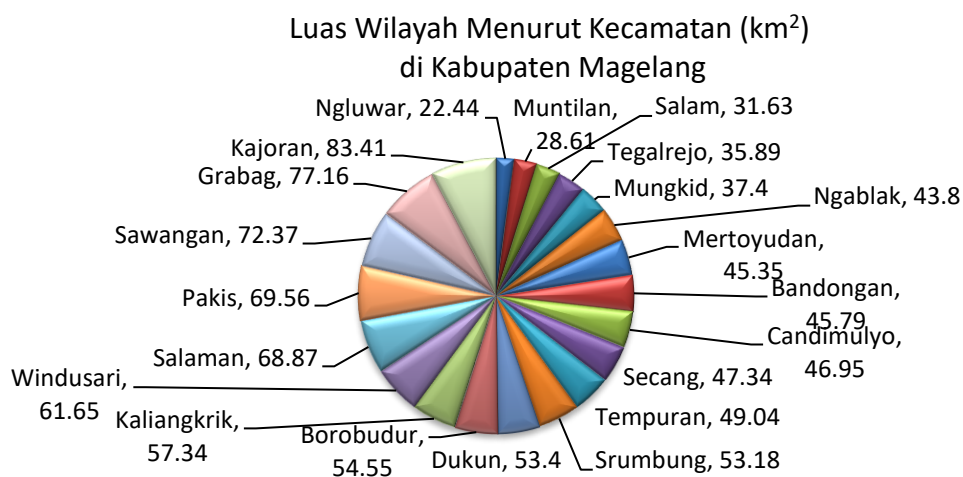


3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kabupaten

Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573

hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;

- 2) Seksi pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi irigasi;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - 3) Seksi Bina Manfaat.
 5. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan Gedung; dan
 - 2) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
 6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
 - 3) Seksi Pertanahan.
 7. UPT, membawahkan subbagian Tata Usaha; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- (Struktur organisasi secara lengkap terlampir)

c. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja , tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- 1) Tugas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Membantu Bupati Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
 - a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan serta kesekretariatan;
 - b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
 - c) Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan;

- e) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2020 sebanyak 179 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	4
4.	KaSubbag / Kepala Seksi / Kepala UPT / KaSubbag TU	22
5.	Fungsional Umum	152
Jumlah		179

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020.

Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Tingkat Kependidikan
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	10
2.	Sarjana (S1)	28
3.	Sarjana Muda (D3)	13

4.	SLTA	88
5.	SLTP	30
6.	SD	9
Jumlah		179

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Golongan
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	7
2.	Golongan III	55
3.	Golongan II	101
4.	Golongan I	16
Jumlah		179

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

Tabel 1.2 Jumlah PNS Menurut Eselon
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	22
4.	Non Eselon	152
Jumlah		179

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

e. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
B	Peralatan dan Mesin		
a	1) Ceketer 2) Loader / wheel loader 3) Mesin Gilas 4) Wacker 5) Pan Mixer 6) Spryer 7) Excavator Backhoe 8) Backhoe Loader 9) Vibro Roller 10)Trailer 11)Mesin Potong Rumput	0 1 22 3 3 5 1 1 1 1 35	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
b	Alat Angkutan		
	- Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Enam - Kendaraan Dinas Roda Tiga - Kendaraan dinas roda dua	11 7 6 82	Unit Unit Unit Unit
c	Alamat Kantor dan Rumah Tangga - Komputer - Laptop - Printer - Mesin Ketik - Meja - Kursi - Kursi Lipat - LCD Projector - Gps - Kamera	27 42 29 16 276 260 51 8 20 17	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
C	Bangunan dan Gedung		
-	Bangunan Kantor	13	Unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kapasitas pelayanan jalan dan kemantapan jalan sesuai masa layanan jalan, lebar jalan yang belum memenuhi standar masih banyak.

2. Banyaknya kondisi jaringan Irigasi yang Rusak/belum terbangun dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara saluran irigasi.
3. Belum terpenuhinya capaian dan layanan pengelolaan sanitasi layak dan pengembangan air minum layak (100%) ini dikarenakan pembangunan sanitasi dan air minum belum menjadi prioritas pembangunan daerah, perilaku hidup sehat dimasyarakat masih kurang dan kondisi sumber mata air dan debit saat ini berkurang kadang kala lahan untuk bangunan sipil dan jaringan sering menjadi konflik.
4. Masih perlunya gedung – gedung pemerintah direnovasi agar berfungsi lebih baik atau layak fungsi.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendirikan bangunan yang berorientasi Tata Ruang serta mengurangi resiko bencana alam.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi..

B. Evaluasi Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar di peroleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2020.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	56.55%	61.63%	67.74%	73.81%	80.68%	87.48%	94.38%	94.38%
1.1	<i>Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang</i>	57.83%	60.97%	66.51%	72%	78.75%	85.42%	92.27%	92.27%

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	Prosen	94,37 %	95,77 %	97,18 %	98,59 %	100%	
2		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Prosen	77,71 %	78,89 %	80,08 %	81,27 %	82,47 %	
3		Cakupan layanan jaringan irigasi	Prosen	83,44 %	85,25 %	87,17 %	88,88 %	90,42 %	

4		Cakupan layanan Sumber Daya Air	Prosen	72,19 %	74,20 %	81,74 %	83,74 %	91,30 %	
5		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	Prosen	99,25 %	99,52 %	99,73 %	99,93 %	100%	
6		Prosentase terbangunnya Landmark	Prosen	66,67 %	75,00 %	83,33 %	91,67 %	100%	
7		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	Prosen	12,50 %	25%	50%	75%	100%	
8		Cakupan layanan air minum **	Prosen	88,79 %	89,91 %	91,03 %	92,15 %	93,27 %	
9		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	Prosen	87,70 %	88,73 %	89,76 %	90,79 %	91,82 %	
10		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	Prosen	82,00 %	86,00 %	90,00 %	95,33 %	100%	
11		Cakupan layanan Jasa konstruksi	Prosen	51,33 %	62,95 %	73,90 %	88,05 %	100%	
12		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	Prosen	39,49 %	45,96 %	52,57 %	59,19 %	65,80 %	
13		Persentase kesesuaian tata ruang	Prosen	42,39 %	50,87 %	59,34 %	67,99 %	76,64 %	
14		Cakupan kinerja pertanahan	Prosen	33,33 %	50,00 %	66,67 %	83,33 %	100%	

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	94,37%
2.		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	77,71%
3.		Cakupan layanan jaringan irigasi	83,44%
4.		Cakupan layanan Sumber Daya Air	72,19%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99,25%
6.		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	12,50%
7.		Cakupan layanan air minum **	88,79%
8.		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	87,70%
9.		Prosentase terbangunnya Landmark	66,67%
10.		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	82,00%
11.		Cakupan layanan Jasa konstruksi	51,33%
12.		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	39,49%
13.		Persentase kesesuaian tata ruang	42,39%
14.		Cakupan kinerja pertanahan	33,33%

Sumber : Perubahan Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja, untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900
2	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000
4	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	1.904.473.125
5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800
Jumlah:		71.238.577.425

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tahun 2020.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 7 Program (Tercantum dalam Perjanjian kinerja hanya 7 program yang bersifat fisik/ non eks BAU dan 2 program bersifat kegiatan rutin kantor/eks BAU) dan terdiri dari 41 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **72.435.996.675**, untuk anggaran non eks BAU Rp. **71.238.577.425,-**.

Dan secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 sebagai mana terlampir.

Untuk kegiatan rutin yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah : Rp. 1,080,025,500
 2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Rp. 117,393,750
- Jumlah eks BAU : Rp. 1,197,419,250**
- Total anggaran : Rp. 72,435,996,675**

Kegiatan yang dilaksanakan di DPUPR Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang, Bantuan Keuangan Gubernur dan Dana Alokasi Khusus tahun 2020.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran startegis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran

per sasaran strategis Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	94,37%	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900	87,18%
2		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	77,71%			
3		Cakupan layanan jaringan irigasi	83,44%	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600	68,23%
4		Cakupan layanan Sumber Daya Air	72,19%			
5		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99,25%	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	93,76%
6		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	12,50%			
7		Cakupan layanan air minum **	88,79%			
8		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	87,70%			

9		Prosentase terbangunnya Landmark	66,67%			
10		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	82,00%	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU-an	1.904.473.125	96.40%
11		Cakupan layanan Jasa konstruksi	51,33%			
12		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	39,49%	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	55.14%
13		Persentase kesesuaian tata ruang	42,39%			
14		Cakupan kinerja pertanahan	33,33%			
Jumlah :					71.238.577.425	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2020 .

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di Kabupaten Magelang juga didukung Program kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	%
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1,080,025,500	70,27%
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,393,750	97,18%
Jumlah :		1,197,419,250	
Total :		72,435,996,675	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang merupakan

AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
B. Realisasi Anggaran

perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Kepala DPUPR Kabupaten Magelang untuk tahun 2020. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu: *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

Presentase Capaian Kinerja

$$(\text{Indikator Positif}) = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

Presentase Capaian Kinerja

$$(\text{Indikator Negatif}) = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/ Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian.

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 dan target kinerja hingga akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran kinerja per sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Cakupan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.97	66.51	69.9	105.10	92.27	75.76%
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan	92.78	94.37	93.39	98.96	100	93.39%
2		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	75.37	77.71	77.74	100.04	82.47	94.26%
3		Cakupan layanan jaringan irigasi	81.57	83.44	83.95	100.61	90.42	92.84%
4		Cakupan layanan Sumber Daya Air	70.18	72.19	66.7	92.40	91.3	73.06%
5		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99.05	99.25	99.05	99.80	100	99.05%
6		Prosentase terbangunnya Landmark	58.33	66.67	58.33	87.49	100	58.33%
7		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	0	12.5	0	0.00	100	0
8		Cakupan layanan air minum **	87.79	88.79	89.03	100.27	93.27	95.45%

9		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	86.67	87.7	100	114.03	91.82	108.91%
10		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	79.33	82	92.67	113.01	100	92.67%
11		Cakupan layanan Jasa konstruksi	37.52	51.33	57.64	112.29	100	57.64%
12		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	33.02	39.49	50.65	128.26	65.8	76.98%
13		Persentase kesesuaian tata ruang	34.1	42.39	69.5	163.95	76.64	90.68%
14		Cakupan kinerja pertanahan	16.67	33.33	40	120.01	100	40.00%

Pada penetapan Kinerja tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis dan memiliki 1 indikator kinerja utama dan 14 indikator kinerja.

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.080.025.500	758.886.923	70.27%
2	Program Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.393.750	114.085.975	97.18%
3	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900	36.024.716.837	87.18%
4	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600	5.635.379.163	68.23%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	8.882.067.735	93.76%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
6	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	1.904.473.125	1.835.912.748	96.40%
7	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	5.667.244.281	55.14%
Jumlah :		72.435.996.675	58.918.293.662	81.34%

Sumber : SIMDA Kabupaten Magelang 2020

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung 7 program dan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 72.435.996.675 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 58.918.293.662,- (81.34%) prosentasi realisasi keuangan masuk dalam kategori **tinggi**, tetapi masih terdapat 3 (tiga) program dengan capaian kurang dari 75%, yaitu Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran 70.27%, Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi dengan realisasi anggaran 68.23%, dan Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dengan realisasi anggaran 55.14%. Kategori rendah, anggaran untuk kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah kegiatan rapat sosialisasi tidak bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan terkait adanya pandemi Covid-19 dan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan ke-PU-an pengadaan tanah untuk IPLT tidak bisa dilaksanakan karena dokumen perencanaan teknis belum lengkap dokumen FS baru menunjukkan alternatif wilayah belum menunjuk lokasi sehingga tanah untuk IPLT tidak bisa terealisasi, target pengadaan tanah dalam DPA 40 bidang terealisasi 51 bidang secara kuantitatif tercapai melebihi 27.5%.

B. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2020 terhadap 1 (satu) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Magelang 2019 - 2024. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun ke I dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019 - 2024.

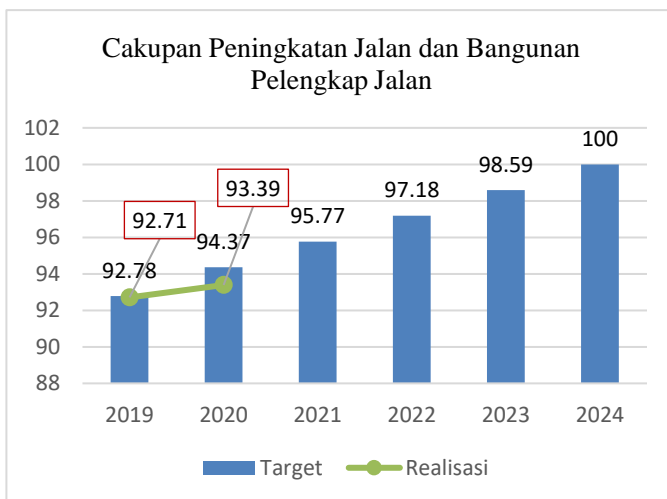
Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atau lebih.
- d. Analisis berupa komitmen peningkatan kinerja Perangkat Daerah berupa inovasi atau strategi peningkatan kinerja atau adanya dukungan sumber dana lainnya dalam peningkatan kinerja.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan indikator kinerja, dimana pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut:

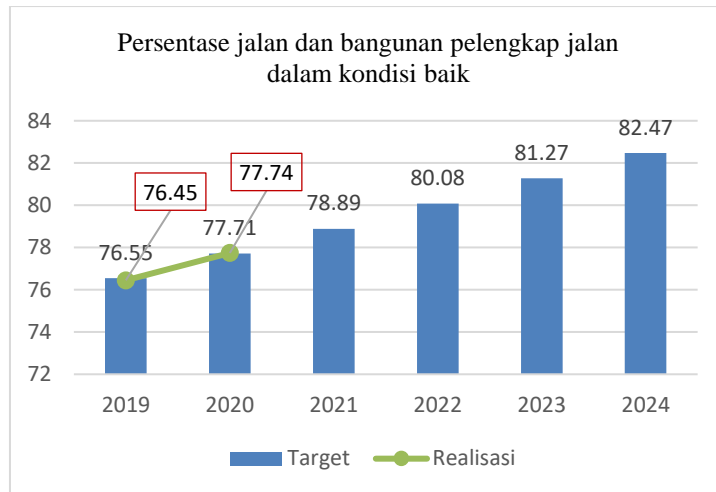
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Per Sasaran
 Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan
 Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	92.78	94.37	93.39	98.96	100	93.39%
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	76.55	77.71	77.74	100.04	82.47	94.26%



((Cakupan ketersediaan jalan) + (cakupan ketersediaan bangunan pelengkap jalan) + (cakupan jalan kondisi kabupaten sesuai standar))/3 **(komulatif)**.

$$(100 + 90.80 + 89.38) / 3 = 93.39$$



((Cakupan jalan kondisi baik) + (cakupan bangunan pelengkap jalan kondisi baik))/2 **(komulatif)**.

$$(77.30 + 78.17)/2 = 77.74$$

Penunjang keberhasilan :

Program peningkatan akses dan kualitas jalan dengan Anggaran 41.324.486.900, realisasi 36.024.716.837 atau (87.18%), ada 8 kegiatan 7 kegiatan dengan capaian kinerja fisik 100%, 1 kegiatan tidak terlaksana karena anggaran *terrefocusing* adanya wabah Covid-19.

Permasalahan :

Kegiatan penyediaan dan pengelolaan data/informasi jalan pada tahun 2020 anggaran *terrefocusing* karena adanya wabah Covid-19.

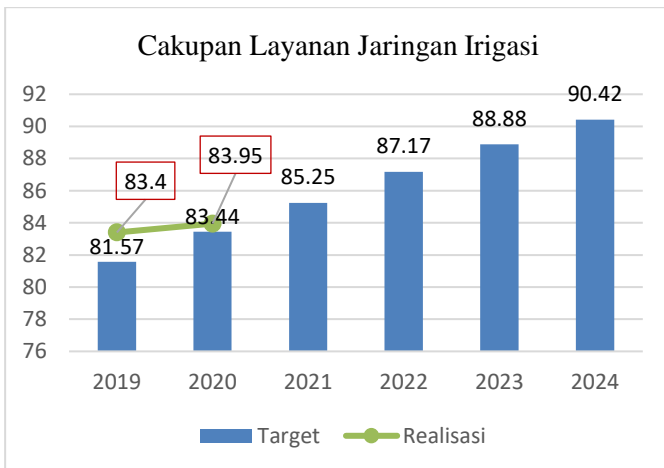
Solusi :

Kegiatan tersebut akan diajukan lagi pada tahun anggaran 2021.

Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

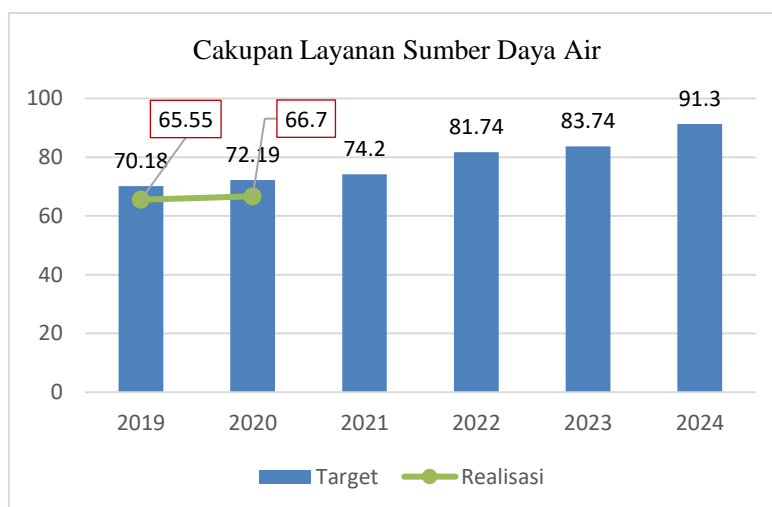
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan jaringan irigasi	81.57	83.44	83.95	100.61	90.42	92.84%

	Cakupan layanan Sumber Daya Air	70.18	72.19	66.7	92.40	91.30	73.06%
--	---------------------------------	-------	-------	------	-------	-------	--------



((Cakupan ketersediaan saluran irigasi) + (cakupan ketersediaan bangunan irigasi) + (cakupan saluran irigasi dan bangunan irigasi dalam kondisi baik) + (cakupan bangunan irigasi dalam kondisi baik)/4) **(komulatif)**.

$$((100 + 89.86 + 70.48 + 75.45)/4) = 83.95\%$$



((Cakupan ketersediaan sumber daya air) + (cakupan akses sawah irigasi) + (cakupan layanan pengelolaan air))/3 **(komulatif)**.

$$(50 + 70.25 + 79.86)/3 = 66.7\%$$

Penunjang keberhasilan :

Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi dengan anggaran 8.259.165.600 realisasi keuangan 5.635.379.163 atau 68.23%, terdiri dari 7 kegiatan 6 kegiatan dengan capaian fisik 100%, 1 kegiatan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) dengan capaian fisik 0 tidak dilaksanakan.

Permasalahan:

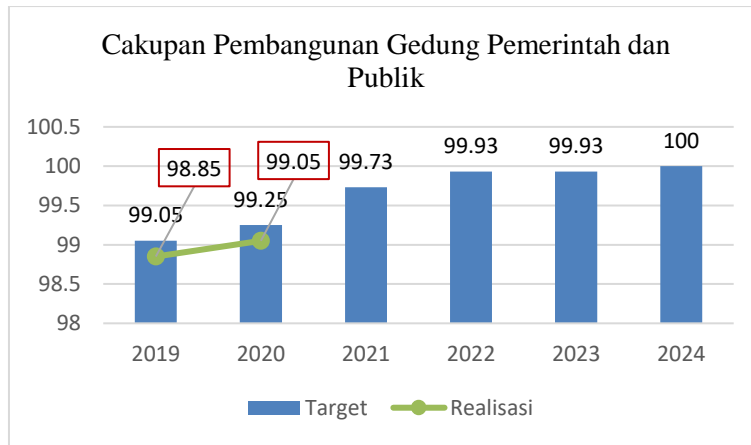
Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) tidak dilaksanakan karena dana cadangan turun (pada perubahan anggaran) dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi selama 180 hari kalender sedangkan waktu tersisa hanya 120 hari kalender belum termasuk lelang.

Solusi:

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan ke tahun anggaran 2021.

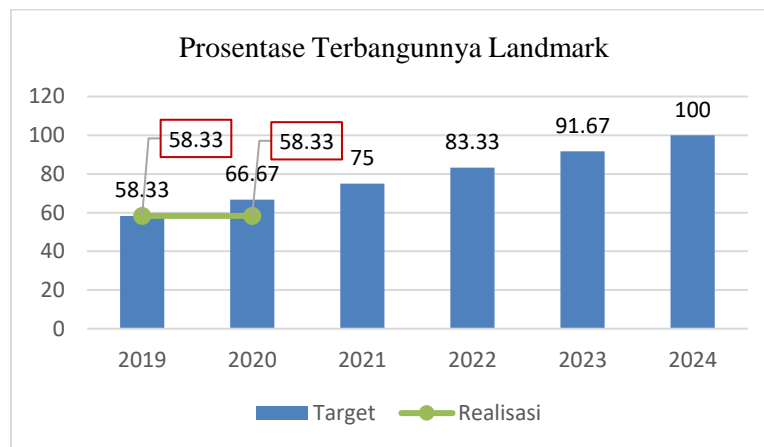
Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99.05	99.25	99.05	99.80	100	99.05%
		Prosentase terbangunnya Landmark	58.33	66.67	58.33	87.49	100	58.33%
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	0	12.50	0	0.00	100	0
		Cakupan layanan air minum **	87.79	88.79	89.03	100.27	93.27	95.45%
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	86.67	87.70	100	114.03	91.82	108.91%



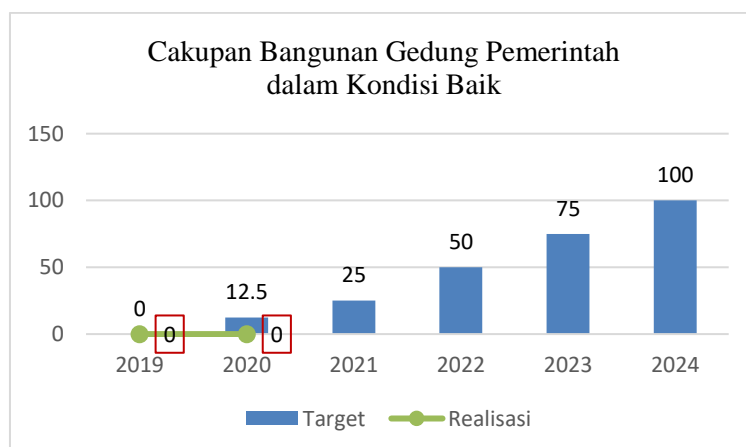
((Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun/jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah)*100%) **(komulatif)**.

$$(1458/1472) * 100\% = 99.05$$



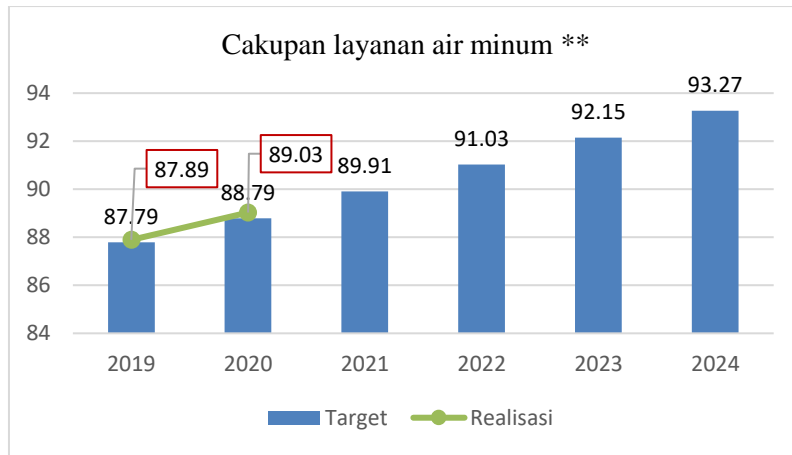
(Jumlah landmark yang dibangun/rencana jumlah pembangunan landmark)*100% **(komulatif)**.

$$(7/12) * 100\% = 58.33$$



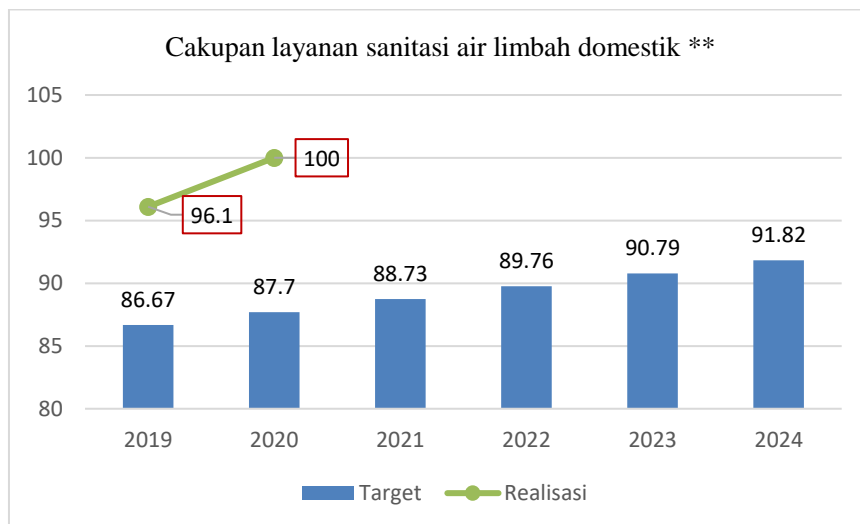
(Jumlah bangunan gedung ber SLF/rencana jumlah bangunan ber SLF)*100% **(komulatif)**.

$$(0/40) * 100\% = 0$$



((Jumlah penduduk yang terlayani air minum/jumlah total penduduk)*100%)
(komulatif).

$$(383496/430749) * 100\% = 89.03$$



((Jumlah penduduk yang terlayani air limbah domestik/jumlah seluruh penduduk)*100%) **(komulatif).**

$$(430749 / 430749) * 100\% = 100\%$$

Penunjang keberhasilan :

Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL dengan Anggaran 9.472.702.000 realisasi 8.882.067.735 realisasi keuangan 93.76%, terdiri dari 8 kegiatan, 7 kegiatan capaian fisik 100% dan 1 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah 84.62%.

Permasalahan :

Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah tidak bisa 100% ada 2 paket pekerjaan konsultan tidak dilaksanakan. Paket konsultan perencanaan tidak dilaksanakan karena kegiatan konstruksi tahun 2021 dibatalkan, untuk konsultan pengawas rehabilitasi gedung

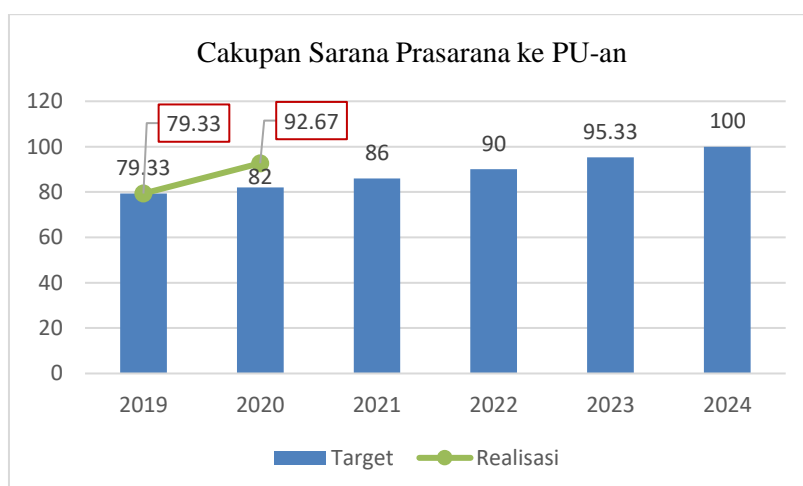
kantor tidak dilaksanakan pengawasan dilaksanakan sendiri oleh DPUPR (efisiensi anggaran).

Solusi :

Konsultan perencana akan dilaksanakan pada tahun 2021 atau mengikuti pembangunan fisik.

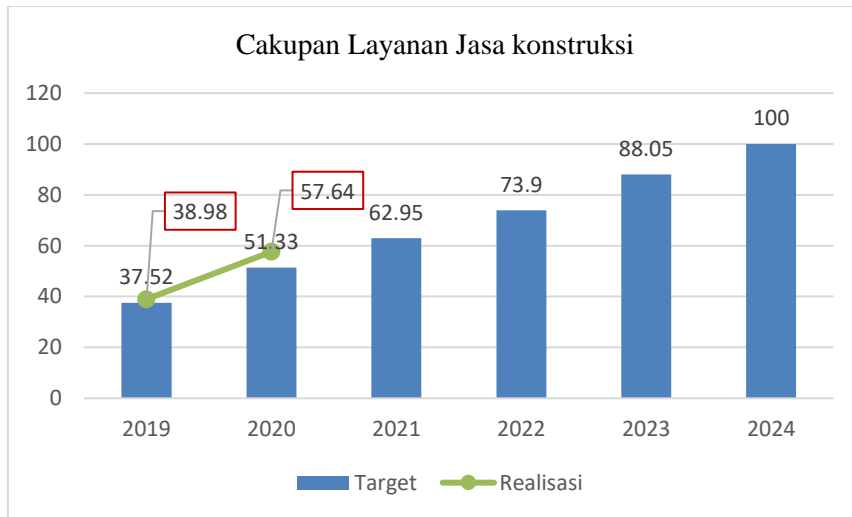
Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan sarana prasarana ke PU-an	79.33	82.00	92.67	113.01	100	92.67%
		Cakupan layanan Jasa konstruksi	37.52	51.33	57.64	112.29	100	57.64%



(Cakupan ketersediaan sarana prasarana ke PU-an + cakupan sarana prasarana ke PU-an dalam kondisi baik)/2 (**komulatif**).

$$(97.33 + 88)/2 = 92.67$$



((Jumlah layanan jasa konstruksi yang sesuai SOP/jumlah ajuan layanan jasa konstruksi) x 100%) **(komulatif)**.

$$(868/1506) * 100\% = 57.64$$

Penunjang keberhasilan :

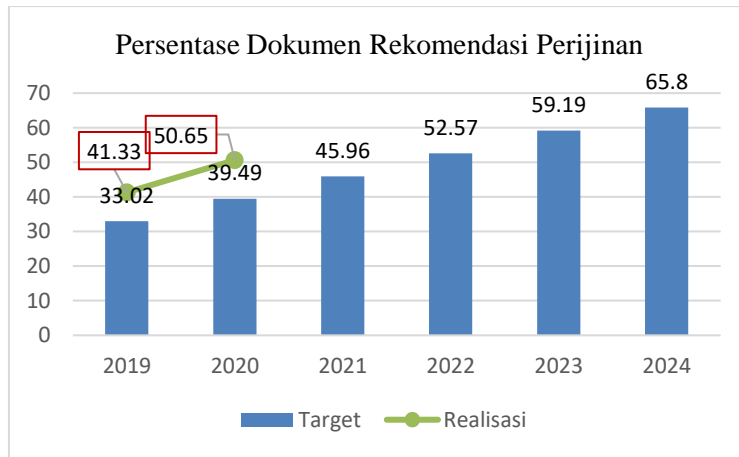
Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an dengan pagu 1.904.473.125 realisasi 1.835.912.748, realisasi keuangan 96.40%, terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Penunjang :

Adanya kerjasama antara UPT Jasa dan Peralatan Konstruksi dengan UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah dilapangan untuk survei harga bahan – bahan bangunan.

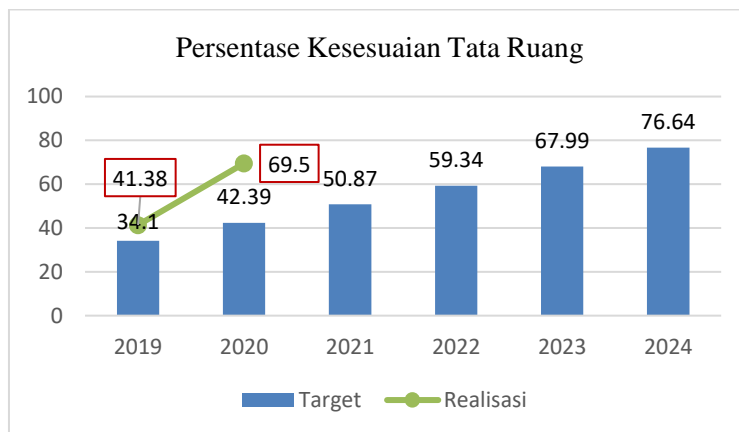
Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
5.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	33.02	39.49	50.65	128.26	65.80	76.98%
		Persentase kesesuaian tata ruang	34.10	42.39	69.5	163.95	76.64	90.68%
		Cakupan kinerja pertanahan	16.67	33.33	40	120.01	100	40.00%



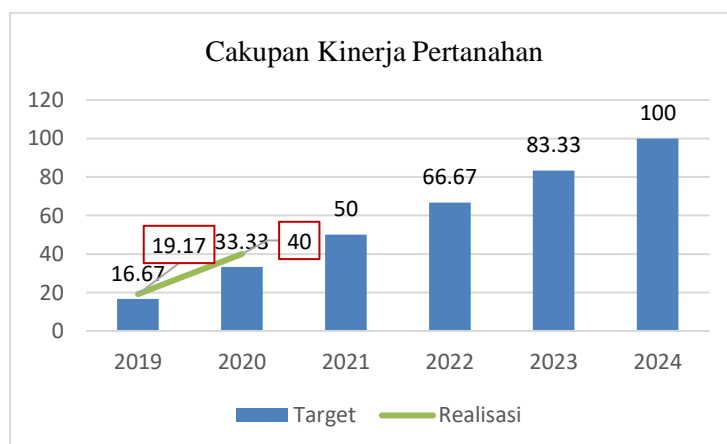
(Jumlah dokumen rekomendasi perijinan yang sesuai/Jumlah permohonan rekomendasi perijinan)*100% **(komulatif)**.

$$(1761/3477) * 100\% = 50.65$$



(Jumlah dokumen kesesuaian tata ruang/jumlah permohonan dokumen kesesuaian tata ruang)*100% **(komulatif)**.

$$(1928/2774) * 100\% = 69.5$$



(Jumlah bidang tanah yang dibebaskan/kebutuhan jumlah bidang tanah yang dibebaskan)*100% **(komulatif)**.

$$(96/240) * 100\% = 40$$

Penunjang keberhasilan:

Program Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dengan pagu 10.277.749.800, realisasi 5.667.244.281, realisasi keuangan 55.14%, terdiri dari 6 kegiatan, 4 kegiatan realisasi fisik 100%. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah realisasi fisik 88.72%, untuk Kegiatan Penyusunan dokumen ketataruangan realisasi fisik 0 karena anggaran *terrefocusing* dengan adanya wabah Covid-19.

Permasalahan:

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah kegiatan rapat sosialisasi tidak bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan terkait adanya pandemi Covid-19 dan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan ke-PU-an pengadaan tanah untuk IPLT tidak bisa dilaksanakan karena dokumen perencanaan teknis belum lengkap dokumen FS baru menunjukkan alternatif wilayah belum menunjuk lokasi sehingga tanah untuk IPLT tidak bisa terealisasi, target pengadaan tanah dalam DPA 40 bidang terealisasi 51 bidang secara kuantitatif tercapai melebihi 27.5%.

Solusi:

Pengadaan tanah untuk IPLT diajukan lagi pada tahun anggaran 2022.

Tabel 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan	100%	97.32%	2.7%	
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	100%	95.02%	4.98%	
		Cakupan layanan jaringan irigasi	100%	98.64%	1.36%	
		Cakupan layanan Sumber Daya Air	100%	65.76%	34.24%	
			100%	99.08%	0.92%	
			100%	96.67%	3.33%	
			100%	99.55%	0.45%	

	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	100%	63.89%	36.11%
	Prosentase terbangunnya Landmark	100%	75.52%	24.48%
	Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	100%	99.59%	0.41%
	Cakupan layanan air minum **	100%	99.13%	0.87%
	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	100%	99.87%	0.13%
		100%	99.99%	0.01%
	Cakupan sarana prasarana ke PU-an	100%	99.56%	0.44%
	Cakupan layanan Jasa konstruksi	100%	95.78%	4.22%
	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	100%	95.62%	4.38%
	Persentase kesesuaian tata ruang	100%	92.28%	7.72%
	Cakupan kinerja pertanahan	100%	33.33%	66.67%
		100%	55.19%	44.81%

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, dan penataan ruang dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- 1) Tercapainya indikator prosentase peningkatan jalan dan pembangunan pelengkap jalan kondisi baik, sesuai dengan SK jalan kabupaten dengan panjang 1000,83 km (ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 182.182/180/KEP/25/2015 tentang status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten).
- 2) Tercapainya cakupan layanan jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35.662,45 Ha.
- 3) Tercapainya cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik pada tiap tahunnya bisa membangun gedung yang layak pakai.
- 4) Indikator rumah tangga pengguna air bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan total jumlah rumah tangga. Indikator ini menunjukkan jumlah rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dan sudah melampaui target yang ditentukan.
- 5) Indikator rumah tangga bersanitasi merupakan antara perbandingan jumlah rumah tangga berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal, jumlah rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Magelang setiap tahunnya meningkat.

- 6) Tercapainya sarana prasarana ke PU-an dan layanan jasa konstruksi, setiap tahunnya bisa menambah peralatan dan meningkatnya layanan jasa konstruksi.
- 7) Tercapainya prosentase dokumen rekomendasi perijinan dan kesesuaian tataruang yang bisa terekomendasi tiap tahunnya.
- 8) Tercapainya cakupan kinerja pertanahan terbukti dengan adanya pelebaran jembatan pada tiap tahunnya.

B. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- a) Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 adanya anggaran yang *terrefocusing* karena adanya wabah Covid-19 sehingga ada indikator kinerja yang belum bisa mencapai target.
- b) Adanya anggaran kegiatan DAK cadangan irigasi turun di anggaran perubahan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi. Pelaksanaan kegiatan memerlukan waktu 180 hari kalender sedangkan waktu yang tersisa hanya 120 hari kalender.
- c) Target di renja tidak direvisi waktu entri di aplikasi SIPD *direfocusing* anggaran maupun di anggaran perubahan 2020.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

Untuk kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam input target di aplikasi SIPD dikala ada perubahan anggaran.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kota Mungkid, Februari 2021
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Kabupaten Magelang**

DAVID RUDIYANTO, ST., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680511 199803 1 005